



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit Organisasi Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional satuan Pendidikan formal di Daerah.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
4. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan formal sesuai dengan kewenangan dan urusan Pemerintah Daerah;
5. Bidang adalah unit organisasi pada Dinas yang menyelenggarakan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.

13. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai UPTD pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TK;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (3) Nomenklatur TK, SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis Dinas untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tingkat pendidikan dasar serta melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas sesuai fungsinya.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara *ex-officio* oleh kepala sekolah.
- (3) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas sesuai fungsinya.

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) TK merupakan kelompok layanan Pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjangn Dinas dalam penyelenggaraan Pendidikan TK.
- (3) TK dipimpin oleh Kepala Sekolah dari pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan.

Pasal 5

- (4) TK mempunyai tugas menyelenggarakan layanan Pendidikan formal jenjang Pendidikan anak usia dini.

- (5) TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
- a. penyelenggaraan program Pendidikan jenjang anak usia dini;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan Kerjasama teknis bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan TK;
 - k. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan Pendidikan;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bertugas sebagai teknis Dinas untuk menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD berfungsi untuk:
 - n. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan dasar;
 - o. penyiapan kebijakan teknis bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan SD;
 - p. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang satuan Pendidikan SD;
 - q. pembinaan dan pengendalian teknis bidang satuan Pendidikan SD;
 - r. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan bidang satuan Pendidikan SD;
 - s. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar bidang satuan Pendidikan SD;

- t. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sectoral bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan SD;
- u. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan Kerjasama teknis bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan SD dengan unit kerja terkait.
- v. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan SD;
- w. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan SD;
- x. Pembinaan kepegawaian pada bidang Pendidikan pada satuan Pendidikan SD;
- y. Pelaksanaan ketatausahaan; dan
- z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bertugas sebagai teknis Dinas untuk menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP berfungsi untuk:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan SMP;
 - b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - j. pengoordinasian, fasilitas dan pembinaan pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada satuan pendidikan SMP;
 - k. pembinaan kepegawaian pada lingkup satuan pendidikan;

- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

Pasal 9

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik lingkungannya maupun antar PD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Teknis Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO.	NAMA UPTD SPF	KECAMATAN
1.	TK BAKTI PERTIWI	BARAS
2.	TK BURRA SENDANA	DAPURANG
3.	TK DHARMA WANITA	PASANGKAYU
4.	TK MAHA LESTARI	BARAS
5.	TK NEGERI DAMBAAN IBU	PEDONGGA
6.	TK NEGERI PEMBINA PEDONGGA	PEDONGGA
7.	TK NEGERI PEMBINA SARUDU	SARUDU
8.	TK NEGERI SATAP BIAI	BULUTABA
9.	TK PEMBINA LARIANG	LARIANG
10.	TK PERMATA BUNDA	BAMBALAMOTU
11.	TK SATAP SD INPRES 004 TIKKE	TIKKE RAYA
12.	TK SATAP SDN 002 MAKMUR JAYA	TIKKE RAYA
13.	TK SATAP SDN SALUNGGALUKU	BAMBALAMOTU
14.	TK SATU ATAP KASOLOANG	BAMBAIRA
15.	TK SATU ATAP SALUKAILI	BARAS
16.	TK SATU ATAP SARJO	SARJO
17.	TK SD SATAP NEGERI KAMPUNG BARU	BULUTABA
18.	TK SD SATAP NEGERI LEMBAH HARAPAN	BULUTABA
19.	TK SEATAP SD INPRES TAMPAURE	BAMBAIRA
20.	TK ASSAMALEUWUANG	DURIPOKU
21.	TK LULU HANDAYANI	PASANGKAYU
22.	TK PERTIWI BAMBAIRA	BAMBAIRA
23.	TK HARAPAN BUNDA TABARODEA	DAPURANG
24.	TK SATAP NURHIDAYAH	BAMBAIRA

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Mulyadi, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA UPTD SPF	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 01 BAMBAIRA	BAMBAIRA
2	SMP NEGERI 02 SATAP BAMBAIRA	BAMBAIRA
3	SMP NEGERI 01 BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
4	SMP NEGERI 02 BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
5	SMP NEGERI 03 BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
6	SMP NEGERI 05 SATAP BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
7	SMP NEGERI 06 SATAP BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
8	SMP NEGERI 4 BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
9	SMP NEGERI 7 BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
10	SMP NEGERI SATAP LELUMPANG	BAMBALAMOTU
11	SMP NEGERI 01 BARAS	BARAS
12	SMP NEGERI 02 BARAS	BARAS
13	SMP NEGERI 03 BARAS	BARAS
14	SMP NEGERI 01 BULUTABA	BULU TABA
15	SMP NEGERI 02 BULUTABA	BULU TABA
16	SMP NEGERI 03 SATAP BULUTABA	BULU TABA
17	SMP NEGERI 01 DAPURANG	DAPURANG
18	SMP NEGERI 02 DAPURANG	DAPURANG
19	SMP NEGERI 03 DAPURANG	DAPURANG
20	SMP NEGERI 04 SATAP DAPURANG	DAPURANG
21	SMP NEGERI 5 DAPURANG	DAPURANG
22	SMP NEGERI 21 BULUBONGGU	DAPURANG
23	SMP NEGERI 01 DURIPOKU	DURIPOKU
24	SMP NEGERI 24 SAPTANAJAYA	DURIPOKU
25	SMP NEGERI 01 LARIANG	LARIANG
26	SMP NEGERI 02 LARIANG	LARIANG
27	SMP NEGERI 03 LARIANG	LARIANG
28	SMP NEGERI 03 SATAP PASANGKAYU	PASANGKAYU
29	SMP NEGERI 04 PASANGKAYU	PASANGKAYU
30	SMP NEGERI 1 PASANGKAYU	PASANGKAYU
31	SMP NEGERI 2 PASANGKAYU	PASANGKAYU
32	SMP NEGERI 23 AKO	PASANGKAYU
33	SMP NEGERI 01 PEDONGGA	PEDONGGA
34	SMP NEGERI 01 SARJO	SARJO
35	SMP NEGERI 02 SARJO	SARJO
36	SMP NEGERI 01 SARUDU	SARUDU
37	SMP NEGERI 02 SARUDU	SARUDU

NO	NAMA UPTD SPF	KECAMATAN
38	SMP NEGERI 03 SATAP SARUDU	SARUDU
39	SMP NEGERI 04 SARUDU	SARUDU
40	SMP NEGERI 20 DODA	SARUDU
41	SMP NEGERI 01 TIKKE RAYA	TIKKE RAYA
42	SMP NEGERI 02 SATAP TIKKE RAYA	TIKKE RAYA

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Mulyadi, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEKOLAH DASAR

NO	NAMA UPTD SPF	KECAMATAN
1	SD INPRES KALUKU NANGKA	BAMBAIRA
2	SD INPRES KASOLOANG	BAMBAIRA
3	SD INPRES TAMPAURE	BAMBAIRA
4	SD NEGERI BAMBAIRA	BAMBAIRA
5	SD NEGERI BAMBARANO	BAMBAIRA
6	SD NEGERI BANTALAKA	BAMBAIRA
7	SD NEGERI BARUGA	BAMBAIRA
8	SD NEGERI PEBONDO	BAMBAIRA
9	SD NEGERI PELONTU	BAMBAIRA
10	SD NEGERI SALUWIRA	BAMBAIRA
11	SD NEGERI TABA	BAMBAIRA
12	SD INPRES KALOLA	BAMBALAMOTU
13	SD INPRES LELUMPANG	BAMBALAMOTU
14	SD INPRES RANDOMAYANG	BAMBALAMOTU
15	SD INPRES TOSONDE	BAMBALAMOTU
16	SD NEGERI BAMBALAMOTU	BAMBALAMOTU
17	SD NEGERI BENDUNGAN	BAMBALAMOTU
18	SD NEGERI KALIBAMBA	BAMBALAMOTU
19	SD NEGERI KAYUMALOA	BAMBALAMOTU
20	SD NEGERI PANGIANG	BAMBALAMOTU
21	SD NEGERI RANDOMAYANG	BAMBALAMOTU
22	SD NEGERI SALULE	BAMBALAMOTU
23	SD NEGERI SALUNGGALUKU	BAMBALAMOTU
24	SD NEGERI SALUWU	BAMBALAMOTU
25	SD NEGERI SAWI	BAMBALAMOTU
26	SD NEGERI TAPALILI	BAMBALAMOTU
27	SD NEGERI WATU BETE	BAMBALAMOTU
28	SD NEGERI WIRABUANA	BAMBALAMOTU
32	SD INPRES BALANTI	BARAS
33	SD INPRES BAMBALOKA	BARAS
34	SD INPRES BURIRO	BARAS
35	SD INPRES MOTU	BARAS
36	SD NEGERI BULILI	BARAS
37	SD NEGERI DURI SANGGE	BARAS
38	SD NEGERI KAPOHU	BARAS
39	SD NEGERI MASIMBU	BARAS
40	SD NEGERI PANGI	BARAS
41	SD NEGERI SALU KAILI	BARAS

NO	NAMA UPTD SPF	KECAMATAN
42	SD NEGERI TOWONI	BARAS
44	SD INPRES 008 LILIMORI	BULU TABA
45	SD INPRES KARAVE	BULU TABA
46	SD INPRES KASTA BUANA	BULU TABA
47	SD INPRES LELEJAE	BULU TABA
48	SD NEGERI BIAI	BULU TABA
49	SD NEGERI DAMPELA	BULU TABA
50	SD NEGERI HOW	BULU TABA
51	SD NEGERI KAMPUNG BARU	BULU TABA
52	SD NEGERI LEMBAH HARAPAN	BULU TABA
53	SD NEGERI PANGANA	BULU TABA
54	SD NEGERI SUMBER SARI	BULU TABA
55	SD NEGERI TATA	BULU TABA
56	SD INPRES LIMUA	DAPURANG
57	SD INPRES SARUDU IV	DAPURANG
58	SD NEGERI BELAWA RAHMAT	DAPURANG
59	SD NEGERI BENGGAULU	DAPURANG
60	SD NEGERI BULUBONGGU	DAPURANG
61	SD NEGERI DAPURANG	DAPURANG
62	SD NEGERI FUNJU	DAPURANG
63	SD NEGERI KASALAI	DAPURANG
64	SD NEGERI PAMANUA	DAPURANG
65	SD NEGERI RONTOJALI	DAPURANG
66	SD NEGERI SILAJA	DAPURANG
67	SD NEGERI SULILI JAMBU	DAPURANG
68	SD NEGERI TABARODEA	DAPURANG
69	SD INPRES SARUDU III	DURIPOKU
70	SD INPRES SARUDU V	DURIPOKU
71	SD NEGERI SIPAKAINGA	DURIPOKU
72	SD NEGERI TARANGGI	DURIPOKU
74	SD INPRES BAJAWALI	LARIANG
75	SD INPRES GODANG	LARIANG
76	SD INPRES PARABU	LARIANG
77	SD INPRES SALUPONTU	LARIANG
78	SD NEGERI KENANGAN	LARIANG
79	SD NEGERI MAJENE	LARIANG
80	SD NEGERI PAHAMPA	LARIANG
81	SD NEGERI PELOSU	LARIANG
82	SD NEGERI RODO	LARIANG
83	SD INPRES AKO	PASANGKAYU
84	SD INPRES GUNUNGSARI	PASANGKAYU
85	SD INPRES SALUMONI	PASANGKAYU
86	SD INPRES TANJUNG BABIA	PASANGKAYU
87	SD NEGERI 02 PASANGKAYU	PASANGKAYU
88	SD NEGERI 01 PASANGKAYU	PASANGKAYU
89	SD NEGERI BAMBA APU	PASANGKAYU

NO	NAMA UPTD SPF	KECAMATAN
90	SD NEGERI BAMBAMONE	PASANGKAYU
91	SD NEGERI MARAMBEAU	PASANGKAYU
92	SD NEGERI PETUNGGU	PASANGKAYU
93	SD NEGERI SALU BULU	PASANGKAYU
94	SD NEGERI SALUNGGADUE	PASANGKAYU
95	SD NEGERI SULU	PASANGKAYU
96	SD NEGERI TARANJA	PASANGKAYU
97	SD INPRES BATUOGE	PEDONGGA
98	SD INPRES KABUYU	PEDONGGA
99	SD INPRES MALEI	PEDONGGA
100	SD INPRES PEDANDA	PEDONGGA
101	SD INPRES PEDONGGA	PEDONGGA
102	SD INPRES MAPONU	SARJO
103	SD INPRES SARJO	SARJO
104	SD NEGERI BALABONDA	SARJO
105	SD NEGERI LANTA	SARJO
106	SD NEGERI LETAWA	SARJO
107	SD NEGERI MAPONU BARU	SARJO
108	SD NEGERI PAMBUA	SARJO
109	SD NEGERI UJUNG SOLI	SARJO
110	SD INPRES DURIPOKU	SARUDU
111	SD INPRES SARUDU I	SARUDU
112	SD INPRES SARUDU II	SARUDU
113	SD NEGERI DODA	SARUDU
114	SD NEGERI KUMA	SARUDU
115	SD NEGERI MONROWALI	SARUDU
116	SD NEGERI NUNU	SARUDU
117	SD NEGERI PATIKA	SARUDU
118	SD NEGERI TANAMONI	SARUDU
119	SD NEGERI TINANGGULI	SARUDU
120	SD INPRES JENGING	TIKKE RAYA
121	SD INPRES KALUKUMBEO	TIKKE RAYA
122	SD INPRES PIRSUS TIKKE	TIKKE RAYA
123	SD INPRES TIKKE	TIKKE RAYA
124	SD NEGERI GOLF	TIKKE RAYA
125	SD NEGERI KALINDU	TIKKE RAYA
126	SD NEGERI LARIANG	TIKKE RAYA

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
Pembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001